Jurnal Ilmu Pendidikan dan Sosial (JIPSI)
Vol. 5, No. 4, Januari 2027
E-ISSN:2829-2723
DOI: 10.58540/jipsi.v5i4.2756

TATA KELOLA BANTUAN KEUANGAN DAN EFEKTIVITAS PENDIDIKAN POLITIK: STUDI PADA DPD PKS KABUPATEN GARUT

Erwin Hamdani[1], Aceng Ulumudin[2], Dodi Yudiardi[3]
[1,2,3]Universitas Garut, Garut, Indonesia
Corresponden E-mail; erwinhamdani@gmail.com

Abstrak

Kajian mengenai bantuan keuangan partai politik di Indonesia sejauh ini didominasi oleh evaluasi kepatuhan administratif formal dan studi kualitatif di tingkat pusat, sehingga menyisakan kesenjangan empiris terkait bagaimana tata kelola pendanaan di tingkat lokal memengaruhi capaian substantif pendidikan politik. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh implementasi kebijakan bantuan keuangan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan partai terhadap efektivitas program pendidikan politik pada DPD PKS Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2024. Menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik *purposive sampling*, data dihimpun melalui kuesioner berskala Likert dari 54 pengurus DPD dan DPC se-Kabupaten Garut, lalu dianalisis menggunakan regresi linear berganda. Hasil uji simultan menunjukkan kedua variabel secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap efektivitas program ($F = 13{,}112$; $p < 0{,}001$; $R^2 = 0{,}340$). Namun, secara parsial, hanya akuntabilitas pengelolaan keuangan yang terbukti berpengaruh positif dan signifikan ($B = 0{,}536$; $p < 0{,}001$), sedangkan implementasi kebijakan tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan ($B = 0{,}073$; $p = 0{,}610$). Temuan ini menegaskan bahwa kepatuhan prosedural semata (*compliance trap*) belum mencukupi tanpa ditopang oleh transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana publik yang terbukti krusial dalam membangun kepercayaan kader serta efektivitas pendidikan politik.
Kata kunci: Implementasi Kebijakan; Bantuan Keuangan Partai Politik, Akuntabilitas; Pendidikan Politik

Abstract

Studies on political party financial assistance in Indonesia have predominantly focused on formal administrative compliance and qualitative assessments at the central executive level, leaving an empirical gap regarding how local-level financial governance directly affects the substantive outcomes of civic political education. This study aims to analyze the simultaneous and partial effects of financial assistance policy implementation and financial management accountability on the effectiveness of political education programs within the Prosperous Justice Party (PKS) of Garut Regency for Fiscal Year 2024. Employing a quantitative design with purposive sampling, survey data were gathered from 54 regional and sub-district party executives and analyzed via multiple linear regression. The simultaneous test reveals that both governance dimensions jointly predict program effectiveness ($F = 13.112$; $p < 0.001$; $R^2 = 0.340$). However, partial testing demonstrates that only financial accountability exerts a statistically significant positive effect ($B = 0.536$; $p < 0.001$), whereas policy implementation shows no significant independent effect ($B = 0.073$; $p = 0.610$). These findings indicate that mere administrative compliance is insufficient without transparent fiscal stewardship, which fundamentally fosters grassroots trust and meaningful political learning.
Keywords: *Policy Implementation, Political Party Financial Assistance, Accountability, Political Education*

Pendahuluan

Bantuan keuangan partai politik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen kebijakan publik strategis untuk memperkuat fungsi partai dalam sistem demokrasi konstitusional. Kerangka hukum nasional mulai dari Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2008 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018, hingga Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 secara eksplisit mewajibkan partai politik memprioritaskan alokasi bantuan keuangan untuk pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat. Pendidikan politik tersebut secara normatif diarahkan pada tiga sasaran pokok dalam Pasal 31 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2008: meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban warga negara, menumbuhkan partisipasi politik dan inisiatif publik, serta memperkokoh kemandirian, kedewasaan politik, dan karakter kebangsaan.

Meskipun demikian, tata kelola pendanaan partai politik di tingkat lokal kerap menghadapi tantangan evaluasi yang mendasar. Dalam konteks Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2024, partai ini mengelola bantuan keuangan APBD sebesar Rp393.689.583 yang disalurkan dalam dua tahap perolehan suara hasil Pemilu 2019 dan Pemilu 2024. Dari total penerimaan tersebut, alokasi riil untuk program pendidikan politik mencapai Rp274.390.278 atau sekitar 69,70%, yang diwujudkan melalui 176 kegiatan (27 seminar, 106 dialog interaktif, dan 43 lokakarya). Dari sisi kepatuhan eksternal, laporan pertanggungjawaban keuangan DPD PKS Garut telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan predikat telah sesuai kriteria (LHP BPK No. 01G/LHP-BP/XVIII.BDG/03/2025).

Namun, tingginya penyerapan anggaran, masifnya frekuensi kegiatan, dan tercapainya kepatuhan administratif tersebut memunculkan persoalan substantif: tertib administratif dan pemeriksaan keuangan belum dengan sendirinya menjamin tercapainya tujuan substantif pendidikan politik. Temuan awal di lapangan mengindikasikan adanya kesenjangan antara realisasi anggaran dengan kualitas capaian kader, seperti tantangan komunikasi materi kebijakan, keterbatasan modul pelatihan yang terstruktur, hingga masih perlunya penguatan kedewasaan berdemokrasi dan kemandirian kader dalam menolak politik uang.

Urgensi penelitian ini semakin ditegaskan oleh keterbatasan kajian empiris terdahulu. Penelitian mengenai bantuan keuangan partai politik sejauh ini didominasi oleh pendekatan kualitatif yang berfokus pada tingkat pengurus pusat, seperti kajian implementasi kebijakan di DPP Partai Demokrat oleh Lestari dkk. (2022) dan DPP PDI Perjuangan oleh Timotius (2023). Di tingkat daerah, studi akuntabilitas keuangan partai umumnya berfokus pada temuan administratif dan kepatuhan audit formal semata, seperti penelitian Aprimulki dan Halim (2021) di Temanggung, Latif dkk. (2022) di Aceh, serta Nabila dkk. (2024) di Tuban, yang belum secara langsung menghubungkan tata kelola pendanaan dengan efektivitas capaian normatif pendidikan politik. Terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) yang nyata berupa ketiadaan model pengujian kuantitatif yang menguji kontribusi implementasi kebijakan dan akuntabilitas keuangan secara terpadu terhadap efektivitas program di tingkat kepengurusan daerah.

Untuk mengisi celah tersebut, penelitian ini mengintegrasikan model implementasi kebijakan George C. Edwards III (1980) meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi dengan tipologi akuntabilitas sektor publik Romzek dan Dubnick (1987) yang mencakup akuntabilitas birokratik, legal, profesional, dan politis. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh parsial maupun simultan antara implementasi kebijakan bantuan keuangan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan terhadap efektivitas program pendidikan politik pada

pengurus DPD dan DPC PKS Kabupaten Garut. Kebaruan penelitian ini terletak pada pengujian model empiris terpadu yang memverifikasi apakah tertib kepatuhan akuntabilitas dan kapasitas implementasi kebijakan benar-benar berkontribusi terhadap pencapaian nilai publik berupa kedewasaan politik kader di tingkat kabupaten.

METODE PENELITIAN

Populasi sasaran dalam penelitian ini mencakup seluruh unsur pimpinan dan pengurus fungsional pada struktur Dewan Pengurus Daerah (DPD) serta perwakilan Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Kabupaten Garut. Penentuan sampel dilakukan menggunakan teknik penarikan sampel bertujuan (*purposive sampling*) dengan menetapkan kriteria inklusi spesifik, yaitu pengurus yang terlibat langsung dalam perencanaan, pengelolaan bantuan keuangan partai politik, serta pelaksanaan dan penerimaan manfaat program pendidikan politik Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan kriteria tersebut, sampel penelitian ditetapkan sebanyak 54 responden dengan komposisi berjenjang yang representatif secara struktural dan geografis:

a. Tingkat DPD (12 responden; 22,22%): Terdiri atas unsur Badan Pengurus Harian (BPH) DPD termasuk Ketua, Sekretaris, Bendahara serta pimpinan bidang fungsional (Kaderisasi, Pembinaan Kepemudaan, dan staf teknis pengelola keuangan bantuan partai). Unsur ini mewakili otoritas perumus kebijakan, pengelola anggaran bantuan keuangan APBD, dan pelaksana pertanggungjawaban administratif organisasi.
b. Tingkat DPC (42 responden; 77,78%): Terdiri atas 1 (satu) orang perwakilan pengurus inti (Ketua, Sekretaris, atau Ketua Bidang Kaderisasi) dari setiap DPC di 42 kecamatan yang ada di seluruh wilayah Kabupaten Garut.

Komposisi 54 responden ini memiliki tingkat representativitas kelembagaan yang kuat. Tingkat DPD merepresentasikan aktor pengambil keputusan sentral dan pengelola dana, sementara tingkat DPC mencakup 100% keterwakilan kewilayahan kecamatan di Kabupaten Garut. Struktur sampel ini memastikan bahwa penilaian terhadap implementasi kebijakan, akuntabilitas tata kelola keuangan, dan efektivitas pendidikan politik dinilai secara komprehensif, baik dari perspektif perumus kebijakan di tingkat kabupaten maupun pelaksana teknis di tingkat akar rumput.

Instrumen Penelitian

Peneliti mengukur tiga variabel menggunakan pernyataan berskala Likert lima tingkat, dengan skor 1 untuk sangat tidak setuju dan skor 5 untuk sangat setuju. Sebanyak 12 butir mengukur implementasi kebijakan bantuan keuangan partai politik, yang mencakup komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana, serta struktur birokrasi. Akuntabilitas pengelolaan keuangan partai diukur melalui 12 butir yang mencakup akuntabilitas birokratik, legal, profesional, dan politis. Efektivitas program pendidikan politik diukur menggunakan 10 butir yang mencakup kesadaran terhadap hak dan kewajiban, partisipasi politik dan inisiatif, serta kemandirian, kedewasaan, dan karakter kebangsaan. Sebagai contoh, instrumen implementasi kebijakan mengadaptasi kerangka Edwards III (1980) mengenai kejelasan penjelasan tujuan kegiatan dan kesesuaian kompetensi pemateri; instrumen akuntabilitas mengadaptasi tipologi Romzek dan Dubnick (1987) mengenai kepatuhan pelaporan pertanggungjawaban legal dan keterbukaan sumber bantuan kepada peserta; sedangkan instrumen efektivitas mengadaptasi

tujuan normatif Pasal 31 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2008 mengenai kesadaran hak politik warga negara serta kemandirian menentukan pilihan tanpa politik uang.

Peneliti menguji validitas internal butir dengan menghitung korelasi Pearson antara skor butir dan skor total konstruk setelah mengeluarkan butir yang sedang diuji. Kriteria validitas yang digunakan ialah nilai r-hitung yang melebihi r-tabel pada taraf 5%. Korelasi terkoreksi seluruh butir berada pada rentang 0,411 hingga 0,682, dengan nilai p dari kurang dari 0,001 sampai 0,002. Hasil tersebut memenuhi kriteria validitas butir yang telah ditetapkan. Peneliti mengukur reliabilitas konstruk menggunakan *Cronbach's Alpha* dengan batas kriteria lebih besar dari 0,70; nilai koefisien alpha untuk implementasi kebijakan sebesar 0,851, akuntabilitas sebesar 0,837, dan efektivitas sebesar 0,878.

Prosedur dan Analisis Data

Peneliti mengumpulkan data dari pengurus DPD dan DPC menggunakan kuesioner untuk mencatat persepsi mereka terhadap ketiga variabel penelitian. Prosedur penelitian mencakup pengendalian bias jawaban dan penyimpanan data melalui pengisian kuesioner secara mandiri (*self-administered*), penyampaian persetujuan sukarela (*informed consent*), serta penjaminan anonimitas dan kerahasiaan responden dengan menggunakan kode identifikasi numerik terpisah dari data jawaban sehingga seluruh pelaporan disajikan secara agregat. Izin penelitian diberikan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Garut serta Dewan Pengurus Daerah (DPD) PKS Kabupaten Garut. Peneliti menghitung skor setiap variabel dari rata-rata butir penyusunnya, kemudian memasukkan skor tersebut ke dalam regresi linear berganda. Model regresi menguji hubungan parsial setiap variabel bebas dengan efektivitas program serta hubungan kedua variabel bebas secara simultan[2]. Peneliti menguji hipotesis pada taraf signifikansi 0,05.

Peneliti memeriksa asumsi regresi menggunakan uji Shapiro–Wilk untuk normalitas residual, uji Breusch–Pagan untuk heteroskedastisitas, serta nilai *variance inflation factor* dan tolerance untuk multikolinearitas. Peneliti juga mencatat uji Durbin–Watson sebagai diagnostik tambahan. Hasil pengujian residual menunjukkan W = 0,956 dengan p = 0,046, sedangkan uji Breusch–Pagan menghasilkan LM = 2,015 dan p = 0,365. Setiap prediktor memiliki nilai VIF 1,766 dan *tolerance* 0,566. Hasil regresi menghasilkan persamaan $\hat{Y} = 1{,}694 + 0{,}073X_1 + 0{,}536X_2$, yang digunakan dalam pengujian parsial maupun simultan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Responden penelitian berjumlah 54 pengurus PKS Kabupaten Garut yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan politik Tahun Anggaran 2024. Komposisi responden mencakup pengurus DPD dan DPC, dengan jumlah yang lebih besar berasal dari tingkat DPC. Rincian tersebut menggambarkan sebaran responden menurut tingkat kepengurusan yang dilaporkan dalam penelitian. Informasi mengenai kategori usia, jenis kelamin, dan pendidikan tidak disajikan dalam hasil penelitian. Tabel 1 menampilkan frekuensi responden berdasarkan tingkat kepengurusan.

Tabel 1. Profil Responden Berdasarkan Tingkat Kepengurusan

Tingkat Kepengurusan	Frekuensi (Orang)	Persentase (%)
Dewan Pengurus Cabang (DPC)	42	77,78%
Dewan Pengurus Daerah (DPD)	12	22,22%
Total	**54**	**100,00%**

Sumber: Data primer diolah dari kuesioner pengurus DPD dan DPC PKS Kabupaten Garut, 2024

Uji Instrumen

Instrumen penelitian memuat 12 butir untuk mengukur implementasi kebijakan bantuan keuangan partai politik, 12 butir untuk akuntabilitas pengelolaan keuangan partai, dan 10 butir untuk efektivitas program pendidikan politik. Pengujian validitas butir menggunakan korelasi Pearson antara skor butir dan skor total konstruk setelah butir terkait dikeluarkan dari skor total. Korelasi terkoreksi seluruh butir berada pada rentang 0,411–0,682, sedangkan nilai signifikansinya berkisar dari $p < 0,001$ sampai $p = 0,002$. Hasil tersebut memenuhi kriteria validitas yang digunakan dalam penelitian, yaitu r-hitung melebihi r-tabel pada taraf 5%. Nilai r-tabel dan statistik terpisah untuk setiap butir tidak dicantumkan pada ringkasan hasil, sehingga tabel menyajikan rentang keseluruhan.

Tabel 2. Ringkasan Uji Validitas Butir

Variabel	Jumlah Butir	Rentang Korelasi Terkoreksi (*r*-hitung)	Rentang Nilai *p*	Keterangan
Implementasi Kebijakan (X_1)	12	0,469 – 0,659	< 0,001	Valid / Memadai
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan (X_2)	12	0,411 – 0,608	< 0,001 – 0,002	Valid / Memadai
Efektivitas Pendidikan Politik (Y)	10	0,543 – 0,682	< 0,001	Valid / Memadai

Sumber: Data primer diolah dari kuesioner pengurus DPD dan DPC PKS Kabupaten Garut, 2024

Koefisien Cronbach's Alpha memperlihatkan konsistensi internal ketiga konstruk yang melampaui batas 0,70. Implementasi kebijakan bantuan keuangan partai politik memperoleh alpha 0,851, sementara akuntabilitas pengelolaan keuangan partai memperoleh alpha 0,837. Efektivitas program pendidikan politik mencatat alpha 0,878. Nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa butir dalam setiap konstruk memiliki konsistensi internal yang memenuhi kriteria penelitian. Tabel 3 merangkum koefisien reliabilitas yang diperoleh untuk seluruh variabel.

Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas

No.	Variabel / Konstruk	Jumlah Butir	Cronbach's Alpha	Kriteria Batas	Keterangan
1	Implementasi Kebijakan Bantuan Keuangan (X_1)	12	0,851	> 0,70	Reliabel
2	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Partai (X_2)	12	0,837	> 0,70	Reliabel
3	Efektivitas Program Pendidikan Politik (Y)	10	0,878	> 0,70	Reliabel

Sumber: Data primer diolah dari kuesioner pengurus DPD dan DPC PKS Kabupaten Garut, 2024

Statistik Deskriptif

Skor deskriptif penelitian dihitung berdasarkan rata-rata butir penyusun setiap variabel dan disajikan pada skala 1–5. Implementasi kebijakan bantuan keuangan partai politik memperoleh rata-rata 4,091 dan masuk kategori tinggi. Dimensi komunikasi mencatat rata-rata 3,988, sedangkan sumber daya memperoleh 4,105. Disposisi pelaksana mencapai 4,130 dan struktur birokrasi memperoleh 4,142. Komunikasi menjadi dimensi dengan rata-rata terendah di antara empat dimensi, sementara penilaian pada seluruh dimensi tetap berada dalam kategori tinggi.

Tabel 4. Statistik Deskriptif Implementasi Kebijakan Bantuan Keuangan Partai Politik

No.	Dimensi	Nilai Rata-Rata	Simpangan Baku (SD)	Kategori
1	Komunikasi	3,988	0,480	Tinggi
2	Sumber Daya	4,105	0,560	Tinggi
3	Disposisi / Sikap Pelaksana	4,130	0,469	Tinggi
4	Struktur Birokrasi	4,142	0,491	Tinggi
	Rata-rata Konstruk X_1	4,091	0,394	Tinggi

Akuntabilitas pengelolaan keuangan partai memperoleh rata-rata 4,177 dan termasuk kategori tinggi. Akuntabilitas birokratik mencatat rata-rata 4,148, sedangkan dimensi legal memperoleh 4,191. Dimensi profesional dan politis masing-masing mendapatkan rata-rata 4,185. Selisih antarnilai dimensi menunjukkan variasi yang terbatas dalam penilaian responden terhadap aspek akuntabilitas. Skor tersebut merangkum persepsi pengurus yang menjadi responden penelitian.

Tabel 5. Statistik Deskriptif Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Partai

Variabel/Konstruk	Dimensi	Nilai Rata-rata	Simpangan Baku (SD)	Kategori
Akuntabilitas (X_2)	Akuntabilitas Birokratik	4,148	0,461	Tinggi
	Akuntabilitas Legal	4,191	0,487	Tinggi
	Akuntabilitas Profesional	4,185	0,500	Tinggi
	Akuntabilitas Politis	4,185	0,423	Tinggi
Rata-rata Konstruk X_2	—	4,177	0,367	Tinggi
Partisipasi/Kesadaran Kewarganegaraan (Y)	Kesadaran Hak dan Kewajiban	4,154	0,447	Tinggi
	Partisipasi Politik dan Inisiatif	4,154	0,452	Tinggi
	Kemandirian, Kedewasaan, dan Karakter Kebangsaan	4,352	0,408	Sangat Tinggi
Rata-rata Konstruk Y	—	4,233	0,372	Sangat Tinggi

Sumber: Data primer diolah dari kuesioner pengurus DPD dan DPC PKS Kabupaten Garut, 2024

Efektivitas program pendidikan politik mencatat rata-rata 4,233 dan masuk kategori sangat tinggi menurut klasifikasi penelitian. Dimensi kesadaran hak dan kewajiban memperoleh rata-rata

4,154, sebagaimana dimensi partisipasi politik dan inisiatif yang juga mencatat 4,154. Kemandirian, kedewasaan, dan karakter kebangsaan memperoleh rata-rata 4,352 dengan kategori sangat tinggi. Perbedaan skor tersebut menunjukkan bahwa penilaian tertinggi muncul pada dimensi kemandirian, kedewasaan, dan karakter kebangsaan. Skor keseluruhan menggambarkan persepsi responden mengenai ketercapaian tujuan program.

Tabel 6. Statistik Deskriptif Efektivitas Program Pendidikan Politik

Dimensi	Mean	SD	Kategori
Akuntabilitas Birokratik	4,148	0,461	Tinggi
Akuntabilitas Legal	4,191	0,487	Tinggi
Akuntabilitas Profesional	4,185	0,500	Tinggi
Akuntabilitas Politis	4,185	0,423	Tinggi
Rata-rata Konstruk X_2	**4,177**	**0,367**	**Tinggi**
Kesadaran Hak dan Kewajiban	4,154	0,447	Tinggi
Partisipasi Politik dan Inisiatif	4,154	0,452	Tinggi
Kemandirian, Kedewasaan, dan Karakter Kebangsaan	4,352	0,408	Sangat Tinggi
Rata-rata Konstruk Y	**4,233**	**0,372**	**Sangat Tinggi**

Sumber: Data primer diolah dari kuesioner pengurus DPD dan DPC PKS Kabupaten Garut, 2024

Uji Asumsi Regresi

Uji Shapiro–Wilk terhadap residual menghasilkan W = 0,956 dengan p = 0,046. Nilai signifikansi tersebut berada di bawah taraf 0,05, sehingga residual menyimpang dari asumsi normalitas menurut kriteria pengujian yang digunakan. Uji Breusch–Pagan menghasilkan LM = 2,015 dengan p = 0,365. Nilai tersebut tidak menunjukkan bukti heteroskedastisitas pada taraf 0,05. Pemeriksaan multikolinearitas memperoleh tolerance 0,566 dan VIF 1,766 untuk setiap prediktor, sehingga indikator yang dilaporkan tidak menunjukkan masalah multikolinearitas.

Tabel 7. Hasil Uji Asumsi Regresi

Jenis Uji Asumsi	Metode / Statistik Uji	Nilai Uji	Nilai *p* / Batas	Kesimpulan
Normalitas Residual	Shapiro–Wilk	W = 0,956	p = 0,046	Menyimpang dari normal (p < 0,05)
Heteroskedastisitas	Breusch–Pagan (LM)	LM = 2,015	p = 0,365	Bebas heteroskedastisitas (p > 0,05)
Multikolinearitas	Tolerance & VIF	Tol = 0,566; VIF = 1,766	Tol > 0,10; VIF < 10	Bebas multikolinearitas
Autokorelasi (Diagnostik)	Durbin–Watson	DW = 1,951	Mendekati 2	Tidak ada autokorelasi serius

Sumber: Data primer diolah dari kuesioner pengurus DPD dan DPC PKS Kabupaten Garut, 2024

Hasil Regresi dan Uji Hipotesis

Regresi linear berganda digunakan untuk menguji hubungan parsial dan simultan kedua variabel bebas dengan efektivitas program pendidikan politik. Model memperoleh R^2 sebesar 0,340 dan adjusted R^2 sebesar 0,314. Nilai R^2 tersebut menunjukkan bahwa model menjelaskan sekitar 33,96% variasi skor persepsi efektivitas program dalam sampel. Uji simultan menghasilkan

F(2, 51) = 13,112 dengan p < 0,001, sehingga model secara keseluruhan berhubungan signifikan dengan variabel terikat. Hasil uji simultan tidak menunjukkan bahwa setiap prediktor secara terpisah memiliki hubungan signifikan.

Tabel 8. Ringkasan Model Regresi

Model	R	R Square (R^2)	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,583	0,340	0,314	0,308

Sumber: Data primer diolah dari kuesioner pengurus DPD dan DPC PKS Kabupaten Garut, 2024

Tabel 9. Hasil Uji Simultan

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig. (p)
Regression	2,485	2	1,242	13,112	< 0,001
Residual	4,832	51	0,095	—	—
Total	**7,317**	**53**	**—**	**—**	**—**

Sumber: Data primer diolah dari kuesioner pengurus DPD dan DPC PKS Kabupaten Garut, 2024

Koefisien implementasi kebijakan bantuan keuangan partai politik bernilai positif sebesar 0,073, tetapi hasil uji parsialnya tidak signifikan. Nilai t = 0,513 dan p = 0,610 menunjukkan bahwa data penelitian belum memberikan dukungan statistik bagi hubungan parsial variabel tersebut dengan efektivitas program setelah akuntabilitas dikendalikan. Akuntabilitas pengelolaan keuangan partai memiliki koefisien positif sebesar 0,536, dengan t = 3,496 dan p < 0,001. Hasil itu menunjukkan hubungan parsial positif yang signifikan antara skor akuntabilitas dan skor efektivitas dalam model. Persamaan regresi yang diperoleh adalah $\hat{Y} = 1{,}694 + 0{,}073X_1 + 0{,}536X_2$.

Tabel 10. Hasil Koefisien Regresi

Variabel / Parameter	Koefisien Terstandar (*B*)	Tak *Std. Error*	Koefisien Terstandar (*Beta*)	*t*	*Sig. (p)*
(Constant)	1,694	0,510	—	3,321	0,002
Implementasi Kebijakan (X_1)	0,073	0,143	0,077	0,513	0,610
Akuntabilitas Keuangan (X_2)	0,536	0,153	0,529	3,496	< 0,001

Sumber: Data primer diolah dari kuesioner pengurus DPD dan DPC PKS Kabupaten Garut, 2024

Keputusan hipotesis mengikuti hasil uji parsial dan simultan pada taraf signifikansi 0,05. Hipotesis mengenai hubungan parsial implementasi kebijakan bantuan keuangan partai politik tidak didukung karena nilai signifikansinya melampaui batas tersebut. Hipotesis mengenai hubungan parsial akuntabilitas pengelolaan keuangan partai didukung oleh koefisien positif dan nilai signifikansi di bawah 0,05. Hipotesis simultan didukung karena hasil uji F menunjukkan hubungan model yang signifikan. Ringkasan keputusan tersebut disajikan dalam Tabel 11.

Tabel 11. Ringkasan Keputusan Uji Hipotesis

Hipotesis	Pernyataan Hubungan	Arah Hubungan / Koefisien	Nilai Signifikansi (*p*)	Kriteria (α= 0,05)	Keputusan
H_1	Implementasi kebijakan (X_1) berpengaruh positif terhadap efektivitas program (Y)	B = 0,073	p = 0,610	p > 0,05	**Ditolak / Tidak Didukung**
H_2	Akuntabilitas pengelolaan keuangan (X_2) berpengaruh positif terhadap efektivitas program (Y)	B = 0,536	p < 0,001	p < 0,05	**Diterima / Didukung**
H_3	Implementasi kebijakan (X_1) dan akuntabilitas (X_2) secara simultan berpengaruh terhadap efektivitas (Y)	F = 13,112	p < 0,001	p < 0,05	**Diterima / Didukung**

Sumber: Data primer diolah dari kuesioner pengurus DPD dan DPC PKS Kabupaten Garut, 2024

Pengaruh Parsial Implementasi Kebijakan

Rumusan mengenai pengaruh parsial implementasi kebijakan bantuan keuangan partai politik dijawab melalui koefisien positif yang tidak signifikan setelah akuntabilitas pengelolaan keuangan partai diperhitungkan. Hasil tersebut memperlihatkan bahwa penilaian positif terhadap pelaksanaan kebijakan belum membentuk hubungan statistik tersendiri dengan efektivitas program dalam model. Temuan itu tidak meniadakan arti pelaksanaan kebijakan bagi penyelenggaraan pendidikan politik. Maknanya lebih terbatas: variasi skor implementasi belum berkaitan secara meyakinkan dengan variasi skor efektivitas ketika skor akuntabilitas turut dianalisis. Penafsiran tersebut selaras dengan desain korelasional penelitian.

Kerangka implementasi Edwards III membantu membaca hasil melalui komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Keempat dimensi menggambarkan unsur yang mendukung penerjemahan ketentuan bantuan menjadi pelaksanaan kegiatan organisasi (Edwards III, 1980). Rata-rata komunikasi yang relatif paling rendah memberi petunjuk bahwa penyampaian tujuan dan informasi kegiatan dapat menjadi bagian yang perlu diperkuat. Kesenjangan antara pelaksanaan administratif dan pengalaman peserta dapat menjelaskan mengapa skor implementasi tidak berhubungan parsial secara signifikan dengan persepsi efektivitas. Kerangka tersebut menerangkan proses kebijakan, bukan memastikan capaian peserta secara otomatis.

Komunikasi kebijakan dapat memengaruhi konsistensi pemahaman panitia, pemateri, dan peserta mengenai tujuan kegiatan. Penjelasan tujuan yang kurang terhubung dengan materi dapat membuat pelaksanaan tetap tertib, tetapi belum tercermin kuat dalam penilaian efektivitas. Sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi yang dinilai tinggi juga dapat membentuk persepsi implementasi secara umum tanpa membedakan mutu hasil kegiatan antarresponden. Variasi jawaban yang terbatas pada skor tinggi berpotensi mengurangi kemampuan model

menangkap keterkaitan parsial. Penjelasan tersebut merupakan tafsir yang sesuai dengan pola hasil, bukan pengukuran mekanisme secara langsung.

Kajian implementasi bantuan keuangan partai pada pendidikan politik memperlihatkan perhatian pada proses penerjemahan kebijakan menjadi kegiatan organisasi (Lestari et al., 2022; Timotius, 2023). Penelitian di Garut memperluas pembahasan itu dengan menguji implementasi bersama akuntabilitas terhadap efektivitas program. Perbedaan konteks organisasi dan fokus pengujian dapat menghasilkan pola hubungan yang tidak sepenuhnya sama dengan kajian terdahulu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penilaian implementasi yang tinggi tidak cukup untuk menyimpulkan adanya hubungan parsial yang terukur setelah prediktor lain dikendalikan. Perbandingan tersebut menempatkan efektivitas sebagai hasil yang perlu dibaca melalui lebih dari satu aspek tata kelola.

Korelasi antara implementasi kebijakan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan partai menunjukkan bahwa kedua prediktor berkaitan dalam penilaian responden. Keterkaitan tersebut dapat membuat sebagian variasi yang berhubungan dengan implementasi juga tercakup dalam skor akuntabilitas. Penggunaan kuesioner pada responden yang sama turut memungkinkan pola penilaian antarkonstruk saling berdekatan. Koefisien parsial mengungkap hubungan implementasi setelah bagian yang berkaitan dengan akuntabilitas diperhitungkan, bukan penilaian atas seluruh manfaat kebijakan. Interpretasi ini menjaga perbedaan antara pentingnya kebijakan secara substantif dan bukti statistik dalam model.

Implikasi teoretis hasil ini ialah kerangka Edwards III menjelaskan kesiapan dan proses pelaksanaan, sedangkan capaian pendidikan politik berkaitan pula dengan tata kelola penggunaan sumber daya. Dalam konteks PKS Kabupaten Garut, komunikasi menjadi dimensi implementasi yang memperoleh penilaian relatif lebih rendah dan layak mendapat perhatian pengelola. Perbaikan dapat diarahkan pada kejelasan tujuan kegiatan, kesesuaian materi, serta penyampaian hasil belajar yang diharapkan. Temuan juga memperluas kajian terdahulu melalui pengujian implementasi bersama akuntabilitas dalam satu model. Cakupan satu organisasi dan satu tahun anggaran membatasi penerapan pola ini pada konteks lain.

Pengaruh Parsial Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan

Rumusan mengenai pengaruh parsial akuntabilitas pengelolaan keuangan partai dijawab oleh hubungan positif yang signifikan dengan efektivitas program setelah implementasi kebijakan dikendalikan. Pola tersebut berarti skor persepsi akuntabilitas yang lebih tinggi berkaitan dengan skor persepsi efektivitas yang lebih tinggi dalam sampel. Hubungan statistik itu tidak menetapkan arah sebab-akibat. Hasilnya memberi petunjuk bahwa pertanggungjawaban dan tata kelola keuangan memiliki keterkaitan khusus dengan penilaian peserta mengenai program pendidikan politik. Pembacaan ini sesuai dengan batas inferensi desain korelasional.

Kerangka akuntabilitas Romzek dan Dubnick menerangkan pertanggungjawaban melalui hubungan antara pelaksana dan pihak yang menilai kinerjanya (Romzek & Dubnick, 1987). Dimensi birokratik, legal, profesional, dan politis dalam penelitian menyediakan sudut pandang untuk memahami keteraturan administrasi, kepatuhan, standar pelaksanaan, serta pertanggungjawaban kepada lingkungan politik. Skor akuntabilitas yang tinggi dapat berkaitan dengan tata kelola kegiatan yang lebih mudah dipahami dan ditelusuri oleh pengurus maupun

peserta. Keteraturan tersebut berpotensi menguatkan keyakinan responden bahwa kegiatan diselenggarakan secara bertanggung jawab. Kuesioner menangkap persepsi atas praktik tersebut.

Hubungan positif akuntabilitas dengan efektivitas dapat dipahami melalui keterhubungan antara penggunaan sumber daya dan penyelenggaraan kegiatan. Pertanggungjawaban yang jelas dapat mendukung perencanaan, pelaksanaan, dan dokumentasi program yang lebih terarah pada tujuan pendidikan politik. Peserta yang melihat kegiatan dikelola secara tertib mungkin menilai pelaksanaan program lebih efektif. Penjelasan tersebut konsisten dengan arah hubungan yang ditemukan, tetapi belum mengisolasi setiap jalur pengaruh yang mungkin berlangsung. Pemeriksaan administratif dan penilaian peserta tetap merupakan bentuk bukti yang berbeda.

Kajian akuntabilitas pengelolaan keuangan partai di Aceh dan Kabupaten Tuban sama-sama menempatkan pertanggungjawaban sebagai perhatian penting dalam tata kelola partai (Latif et al., 2022; Nabila et al., 2024). Penelitian di Garut menghubungkan pokok bahasan tersebut dengan efektivitas program pendidikan politik, sehingga memperluas fokus dari pengelolaan keuangan menuju penilaian atas kegiatan. Kesamaan perhatian pada akuntabilitas mendukung relevansi konstruk dalam konteks partai politik. Perbedaan keluaran yang diuji menjadikan hasil Garut tambahan empiris, bukan pengulangan kesimpulan kajian sebelumnya. Hubungan yang terlihat tetap merujuk pada persepsi responden.

Akuntabilitas profesional dan politis memperoleh penilaian yang berdekatan, sementara dimensi birokratik memiliki nilai relatif lebih rendah daripada dimensi lain. Pola tersebut memberi gambaran bahwa penilaian atas akuntabilitas mencakup lebih dari kepatuhan administratif semata. Hubungan parsial yang signifikan dapat muncul karena responden mengaitkan tata kelola yang dapat dipertanggungjawabkan dengan keteraturan pelaksanaan program. Penjelasan alternatifnya ialah penilaian umum yang positif terhadap organisasi dapat memengaruhi jawaban pada kedua konstruk. Data potong lintang tidak menentukan urutan terbentuknya persepsi tersebut.

Kontribusi teoretis temuan ini terletak pada penerapan kerangka akuntabilitas untuk membaca keterkaitan pengelolaan keuangan partai dengan persepsi efektivitas pendidikan politik. Kerangka Romzek dan Dubnick (1987) menjelaskan dimensi pertanggungjawaban, sedangkan tujuan pendidikan politik dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 memberi acuan bagi penilaian program. Penggabungan kedua lensa itu memperlihatkan bahwa penilaian efektivitas dapat berkaitan dengan cara organisasi mempertanggungjawabkan sumber daya. Pengurus dapat mempertahankan tertib administrasi dan memperjelas informasi kegiatan kepada peserta. Pemeriksaan kepatuhan keuangan tetap memerlukan penilaian administratif tersendiri.

Hubungan Simultan Kedua Variabel

Rumusan mengenai hubungan simultan implementasi kebijakan bantuan keuangan partai politik dan akuntabilitas pengelolaan keuangan partai dijawab oleh model regresi yang signifikan. Hasil uji model menunjukkan bahwa kedua prediktor secara bersama berkaitan dengan efektivitas program pendidikan politik. Daya jelas model menunjukkan bahwa gabungan prediktor menjelaskan sebagian variasi skor persepsi efektivitas, sedangkan bagian lainnya berada di luar model. Signifikansi simultan tidak mengubah hasil parsial implementasi yang tidak signifikan. Perbedaan tersebut menunjukkan pentingnya memisahkan penilaian atas model keseluruhan dari kontribusi setiap prediktor.

Kerangka Edwards III menerangkan bagaimana komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi mendukung penerapan kebijakan. Kerangka Romzek dan Dubnick (1987) menjelaskan bagaimana pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya dinilai melalui beberapa dimensi akuntabilitas. Integrasi kedua kerangka memberi pemahaman bahwa efektivitas yang dipersepsikan dapat berkaitan dengan kesiapan pelaksanaan sekaligus praktik pertanggungjawaban. Hasil parsial menunjukkan bahwa dalam model penelitian, hubungan akuntabilitas lebih tampak setelah implementasi dikendalikan. Model simultan tetap menangkap keterkaitan gabungan keduanya dengan penilaian efektivitas.

Penelitian terdahulu tentang implementasi bantuan keuangan partai menekankan proses penyelenggaraan pendidikan politik, sedangkan kajian akuntabilitas membahas tata kelola keuangan partai (Lestari et al., 2022; Latif et al., 2022). Penelitian ini mempertemukan kedua ranah itu dalam pengujian terhadap efektivitas program di PKS Kabupaten Garut. Perluasan tersebut menjawab celah empiris mengenai pengujian bersama implementasi dan akuntabilitas pada satu model. Temuan simultan mendukung relevansi pembacaan terpadu, meskipun hasil parsial memperlihatkan peran yang tidak seragam. Sintesis ini membantu membedakan kontribusi gabungan dari hubungan khusus setiap variabel.

Nilai daya jelas model mengisyaratkan bahwa efektivitas program tidak tercakup sepenuhnya oleh dua prediktor yang diuji. Tujuan pendidikan politik meliputi kesadaran hak dan kewajiban, partisipasi politik, serta kemandirian dan kedewasaan politik sebagaimana diarahkan undang-undang. Persepsi peserta terhadap capaian tersebut dapat berhubungan dengan pelaksanaan materi dan pengalaman mengikuti kegiatan, selain tata kelola keuangan. Penelitian ini tidak mengukur seluruh kemungkinan penjelas itu sebagai prediktor terpisah. Model memberikan pemahaman terukur tentang hubungan organisasi dan persepsi efektivitas dalam konteks yang diteliti.

Implikasi praktis hasil simultan mengarah pada pengelolaan program yang menyatukan kejelasan pelaksanaan dengan pertanggungjawaban sumber daya. Pengurus dapat menghubungkan tujuan kegiatan, materi, penggunaan dana, dan dokumentasi evaluasi agar proses program lebih mudah ditelusuri. Pemerintah daerah melalui perangkat berwenang dapat mendukung pembinaan administrasi sesuai kewenangannya. Evaluasi kegiatan juga dapat mencatat tujuan, karakteristik peserta, materi, dan umpan balik secara sistematis. Langkah tersebut merupakan arah penguatan program yang konsisten dengan pola hubungan dalam penelitian.

Kontribusi utama penelitian terletak pada pengujian bersama implementasi kebijakan bantuan keuangan partai politik dan akuntabilitas pengelolaan keuangan partai terhadap efektivitas program pendidikan politik di tingkat kabupaten. Kerangka implementasi menerangkan penerjemahan kebijakan, sementara kerangka akuntabilitas menerangkan pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya. Keduanya bersama-sama memberi gambaran lebih utuh tentang hubungan tata kelola partai dengan persepsi efektivitas program. Tafsir hasil tetap dibatasi oleh pengukuran potong lintang, satu organisasi, dan jawaban responden yang sama. Penelitian berikutnya dapat memperluas organisasi dan periode serta menggabungkan penilaian peserta dengan dokumen pertanggungjawaban.

Mekanisme Simultan dan Parsial: Menjelaskan Efek Non-Signifikan Implementasi Kebijakan

Pengujian model regresi menghasilkan temuan empiris yang menarik: implementasi kebijakan bantuan keuangan (X_1) dan akuntabilitas pengelolaan keuangan (X_2) secara bersama-sama (simultan) terbukti berpengaruh signifikan terhadap efektivitas program pendidikan politik (Y) dengan nilai F = 13,112 ($p < 0,001$) dan koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,340. Namun, ketika diuji secara parsial, pengaruh implementasi kebijakan tidak signifikan (B = 0,073; t = 0,513; p = 0,610), sementara akuntabilitas pengelolaan keuangan menunjukkan pengaruh positif yang dominan dan signifikan (B = 0,536; t = 3,496; $p < 0,001$).

Perbedaan antara hasil uji simultan dan parsial ini mengindikasikan bahwa implementasi kebijakan dan akuntabilitas keuangan berfungsi sebagai satu kesatuan ekosistem tata kelola program. Dalam kerangka simultan, implementasi kebijakan menyediakan landasan operasional seperti kejelasan regulasi, ketersediaan pedoman, struktur kepanitiaan, dan alokasi waktu kegiatan yang menjadi prasyarat berjalannya program. Namun, ketika akuntabilitas keuangan dikontrol dalam model parsial, kontribusi unik implementasi kebijakan terhadap pencapaian hasil normatif pendidikan politik (kesadaran hak dan kewajiban, partisipasi aktif, serta kemandirian menolak politik uang) menjadi tidak bermakna secara statistik.

Temuan tidak signifikannya implementasi kebijakan secara parsial ini dapat dijelaskan melalui fenomena *administrative decoupling* atau jebakan formalisme administratif (*compliance trap*) dalam birokrasi partai politik di tingkat lokal. Dalam praktiknya di DPD PKS Kabupaten Garut, dimensi-dimensi implementasi kebijakan versi Edwards III (1980) khususnya komunikasi petunjuk teknis dan kepatuhan struktur birokrasi cenderung terkonsentrasi pada pemenuhan kewajiban prosedural demi memenuhi standar pemeriksaan eksternal BPK dan Bakesbangpol. Keteraturan alur pelaporan, kelengkapan berkas administrasi, dan pemenuhan target frekuensi program (sebanyak 176 kegiatan yang mencakup seminar, dialog, dan lokakarya) terbukti berhasil menjaga kepatuhan legal organisasi, tetapi tidak secara otomatis mentransformasi substansi pedagogis dan kesadaran politik peserta di tingkat cabang (DPC). Dengan kata lain, kelancaran administratif bersifat sebagai *necessary condition* (syarat perlu) yang memfasilitasi terselenggaranya kegiatan, tetapi bukan *sufficient condition* (syarat cukup) untuk menghasilkan perubahan perilaku politik kader secara mandiri.

Dominasi Akuntabilitas Keuangan sebagai Determinan Efektivitas Program

Berbeda dengan implementasi kebijakan, akuntabilitas pengelolaan keuangan terbukti menjadi faktor penentu utama (β= 0,529). Temuan ini memperluas tipologi akuntabilitas Romzek dan Dubnick (1987) dalam ranah organisasi kepartaian di tingkat lokal. Akuntabilitas di DPD PKS Garut tidak hanya dimaknai sebatas akuntabilitas legal (kepatuhan laporan SPJ kepada BPK), melainkan meresap ke dalam akuntabilitas profesional dan akuntabilitas politis. Ketika pengurus partai secara terbuka menjelaskan sumber bantuan keuangan APBD, mengalokasikan anggaran secara tepat sasaran tanpa pemotongan biaya logistik kegiatan, serta menyajikan pertanggungjawaban program yang transparan kepada struktur DPC, tercipta rasa saling percaya dan legitimasi moral di internal partai.

Kepercayaan kader terhadap kejujuran dan keterbukaan tata kelola keuangan pengurus menciptakan iklim pembelajaran politik yang kredibel. Pendidikan politik yang mengajarkan nilai-nilai anti-politik uang dan integritas publik menjadi bermakna dan terinternalisasi secara efektif karena institusi partai sendiri mempraktikkan akuntabilitas nyata dalam mengelola dana publik. Hal ini mengonfirmasi bahwa efektivitas pendidikan politik bukan sekadar fungsi dari seberapa tertib juknis dijalankan, melainkan sangat ditentukan oleh integritas moral pengelolaan anggaran yang mampu menghadirkan keteladanan nyata bagi para kader di tingkat akar rumput.

SIMPULAN

Penelitian ini membuktikan bahwa secara simultan, implementasi kebijakan bantuan keuangan partai politik dan akuntabilitas pengelolaan keuangan partai berhubungan signifikan dengan efektivitas program pendidikan politik pada DPD PKS Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2024 ($F = 13{,}112$; $p < 0{,}001$), dengan kontribusi penjelas variasi sebesar 34,0% ($R^2 = 0{,}340$). Namun, pengujian parsial memperlihatkan kontribusi yang tidak seragam: implementasi kebijakan tidak menunjukkan hubungan parsial yang signifikan terhadap efektivitas program ($B = 0{,}073$; $p = 0{,}610$), sementara akuntabilitas pengelolaan keuangan menunjukkan hubungan positif yang dominan dan signifikan secara statistik ($B = 0{,}536$; $p < 0{,}001$). Temuan ini mengindikasikan bahwa kepatuhan prosedural formal semata belum cukup untuk memprediksi capaian substantif pendidikan politik, sedangkan integritas dan transparansi pengelolaan dana publik di tingkat lokal menjadi faktor asosiatif yang sangat krusial dalam membangun kepercayaan kader.

Rekomendasi praktis perlu ditempatkan secara berimbang dan proporsional. Mengingat penelitian ini menggunakan desain korelasional potong lintang (*cross-sectional*) berbasis persepsi responden, hubungan positif akuntabilitas tidak dapat ditafsirkan secara mekanis sebagai hubungan sebab-akibat langsung. Oleh karena itu, penguatan akuntabilitas tidak boleh diperlakukan sebagai satu-satunya penentu keberhasilan program. DPD PKS Kabupaten Garut disarankan menjaga kesinambungan akuntabilitas tata kelola bantuan keuangan APBD termasuk keterbukaan alokasi dana dan responsivitas terhadap masukan kader yang diimbangi dengan perbaikan substantif pada dimensi komunikasi kebijakan yang mencatat skor terendah. Perbaikan tersebut mencakup penyusunan kurikulum atau modul pendidikan politik yang terstruktur, standardisasi kompetensi pemateri, serta kejelasan orientasi pembelajaran. Bagi Pemerintah Kabupaten Garut melalui Bakesbangpol, pembinaan bantuan keuangan disarankan mulai mengintegrasikan evaluasi capaian substantif pendidikan politik bersamaan dengan pengawasan tertib administrasi SPJ.

Keterbatasan penelitian ini bersumber dari cakupan satu organisasi kepartaian pada satu tahun anggaran serta potensi bias penilaian mandiri (*common method variance*). Peneliti selanjutnya disarankan memperluas kajian ke lintas partai politik dan tahun anggaran jamak, mengombinasikan data persepsi dengan verifikasi dokumen keuangan riil, serta menerapkan desain eksperimental atau pengukuran sebelum dan sesudah kegiatan (*pre-test and post-test*) guna menguji perubahan perilaku politik dan hubungan kausalitas secara lebih definitif.

DAFTAR PUSTAKA

Alfauzi, E., Sihabudin, A. A., & Budiawan, A. (2025). Efektivitas Badan Kesbangpol Ciamis Dalam Penggunaan Dana Bantuan Untuk Partai Politik di Kabupaten Ciamis. *JURNAL ILMIAH NUSANTARA*, *2*(5), 712–720. https://doi.org/10.61722/JINU.V2I5.5571

Aprimulki, E., & Halim, A. (2021). Analisis atas temuan berulang bantuan keuangan partai politik di Kabupaten Temanggung. Kajian Bisnis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha, 29(1), 1–15. https://doi.org/10.32477/jkb.v29i1.234

Ayomi, T. L. (2024). Implementasi Kebijakan Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik Oleh Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kota Depok Tahun 2021-2023. *GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal Dan Pembangunan*, *11*(1). https://doi.org/10.56015/GJIKPLP.V11I1.288

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2025). *Laporan hasil pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik Tahun Anggaran 2024* (No. 01G/LHP-BP/XVIII.BDG/03/2025, 26 Maret 2025).

Dye, T. R. (2013). Understanding public policy (edisi ke-14). Pearson.

Edwards III, G. C. (1980). *Implementing public policy*. Congressional Quarterly Press. https://books.google.com/books?id=hAq8AAAAIAAJ

Irsan, I. (2025). Pengaturan Sanksi Dalam Pengelolaan Dana Partai Politik yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, *5*(1), 368–385. https://doi.org/10.31004/INNOVATIVE.V5I1.17459

Latif, I. R., Ikhsan, Afriandi, F., Saputra, A., & Lestari, Y. S. (2022). Akuntabilitas pengelolaan keuangan partai politik lokal Aceh. *Al-Ijtima'i: International Journal of Government and Social Science*, 8(1), 29–38. https://journal.ar-raniry.ac.id/index.php/jai/article/download/1790/1096/4721

Lestari, N. P., Djohan, D., & Nurdin, I. (2022). Implementasi kebijakan penggunaan bantuan keuangan partai politik dalam pelaksanaan pendidikan politik di Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 4(6). https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/download/9006/6789

Mida, A. S., Yusuf, M., & Utaminingtyas, T. H. (2025). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Partai Politik pada Kantor DPC PDI-Perjuangan Kota Bekasi Tahun 2024. *Ekopedia: Jurnal Ilmiah Ekonomi*, *1*(3), 986–1002. https://doi.org/10.63822/PE4KQM86

Moore, M. H. (1995). Creating public value: Strategic management in government. Harvard University Press. https://markmoore.scholars.harvard.edu/publications/creating-public-value-strategic-management-government-0

Moore, M. H., & Khagram, S. (2004). On creating public value: What business might learn from government about strategic management. Corporate Social Responsibility Initiative Working Paper No. 3. Harvard Kennedy School. https://www.hks.harvard.edu/sites/default/files/centers/mrcbg/programs/cri/files/workingpaper_3_moore_khagram.pdf

Muchlis, M., Arsyad, A., & Kambo, G. A. (2026). Transparansi Pengelolaan Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD di Provinsi Sulawesi Tengah: Transparency in the Management of Political Party Financial Assistance from the Regional Budget in Central Sulawesi Province. *Jurnal Kolaboratif Sains*, *9*(5), 3716–3730. https://doi.org/10.56338/JKS.V9I5.11072

Nabila, K. K., Huda, M. M., & Kasiami, S. (2024). Akuntabilitas bantuan keuangan partai politik (PKB, Partai Golkar, & PDIP) di Kabupaten Tuban. *Journal of Political Issues*, 6(1), 46–58. https://doi.org/10.33019/jpi.v6i1.211.

Rakhman, Moh. A., & Muhammad, H. A. (2019). Analisis Pengelolaan Dana Partai Terhadap Masa Depan Partai Politik: Sebuah Kajian Penguatan Party-ID Terhadap Partai Politik Baru 2019. *Journal of Politics and Policy*, *1*(2), 155–166. https://doi.org/10.21776/UB.JPPOL.2019.001.02.4

Romzek, B. S., & Dubnick, M. J. (1987). Accountability in the public sector: Lessons from the Challenger tragedy. *Public Administration Review*, 47(3), 227–238. https://doi.org/10.2307/975901.

Timotius. (2023). Implementasi kebijakan penggunaan bantuan keuangan partai politik dalam meningkatkan pendidikan politik di Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. *Public Administration Journal*, 7(2), 160–174. https://journal.moestopo.ac.id/index.php/paj/article/view/6022